



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI MALUKU**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 telah selesai disusun.

Dokumen Renja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam serangkaian proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dengan harapan agar program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Renja Tahun 2024 disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang optimal, demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku serta Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, dalam upaya akselerasi perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang mengikhtiarkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI MALUKU,



Ir. LUTHFI RUMBIA, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630310 198908 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	9
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
	1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021.....	14
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022.....	14
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan..	39
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.....	41
	2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	46
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	60
	3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	60
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan..	61
	3.3 Program dan Kegiatan.....	63
	3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	70
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	79
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024.....	79
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	85
	5.2 Rencana Tindaklanjut.....	86

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2024	4
Tabel 1.2	Pencapaian Target Sasaran Daerah (IKU)	6
Tabel 1.3	Keterkaitan Program terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022	20
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU Perangkat Daerah Hingga Tahun 2022)	40
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Provinsi Maluku	46
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Provinsi Maluku.....	58
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Urusan Pangan.....	62
Tabel 3.2	Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	66
Tabel 3.3	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	70
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	72
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku untuk periode tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan. Namun dengan terbitnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan perubahan terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka seluruh perangkat daerah akan menjadikan dokumen Perubahan RPJMD dimaksud sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Sehubungan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 masih dalam proses evaluasi Gubernur saat Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2024 ditetapkan, maka dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, substansi di dalam dokumen Rancangan Peraturan

Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 menjadi bagian dari kertas kerja penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024. Selanjutnya, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dimaksud, dipedomani oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renja perangkat daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 30 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah memuat evaluasi kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1),

klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 1 ayat (21), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Secara umum, mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak mengalami perubahan, mengingat penyusunan Renja masih berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan
6. Penetapan Renja

Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, melalui program dan kegiatan yang tentunya selaras dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan pula kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 juga memuat tentang rencana pencapaian prioritas pembangunan daerah yaitu **Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan** yang merupakan **Misi Ketiga Gubernur Maluku Periode 2019-2024** yang memiliki **Tujuan Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat** dengan indikator **Percepatan Pengentasan Kemiskinan** dan Sasarannya adalah **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** dengan indikator OPD **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** dimana hal ini tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan dokumen RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024. Dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tersebut, keterkaitan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku 2019-2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM	OUTCOME		TARGET
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Indikator : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	11 Ton
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	75
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya penanganan daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	23,7 %
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu	80 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Berdasarkan keterkaitan Renja terhadap RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku yaitu **Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan** yang merupakan **Misi Ketiga Gubernur Maluku Periode 2019-2024** yang mengarah pada **Tujuan Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat** dengan indikator **Percepatan Pengentasan Kemiskinan** dan Sasarannya adalah **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** dengan indikator OPD **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** didukung 4 program utama dan 1 program penunjang.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 juga mendukung pencapaian target sasaran daerah (IKU) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Maluku 2024. Pencapaian target sasaran daerah (IKU) Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Target Sasaran Daerah (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

NO	ASEPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN							
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	-	15	11	11	11	11
2	KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN							
	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	-	-	-	-	25,4	23,7
3	KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN							
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	-	86,5	87	70	75	75
4	KEAMANAN PANGAN							
	Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu	%	-	55	65	70	75	80

Berdasarkan keterkaitan Renja terhadap RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, pencapaian target sasaran daerah (IKU) tahun 2024 yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator sasaran adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didukung oleh 4 program utama dan pencapaian target sasaran daerah (IKU) tahun 2024 yaitu Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif didukung 1 program penunjang.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 juga juga tidak terlepas dari Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang sudah dicanangkan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional tahun 2024, yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
6. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
7. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Keterkaitan Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tahun 2024 terhadap prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3

Keterkaitan Program terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	11	Ton
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	75	Angka
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya penanganan daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	23,7	%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu	80	%
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa prioritas pembangunan nasional yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas di dukung oleh 4 program utama Dinas ketahanan pangan dan prioritas pembangunan nasional yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik didukung oleh 1 program penunjang Dinas Ketahanan Pangan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103 Tahun 2020);

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan RAPBD tahun 2024.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam mencapai target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2024.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Capaian Renstra Sampai dengan Tahun 2022

- Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Pada program ini hanya terdiri 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan dengan 1 (satu) Sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang ditargetkan 2 Unit bantuan pendukung kemandirian pangan berupa Mesin Parut Kelapa di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan realiasi 2 unit atau persentase pencapaian 100%.

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Pada Program ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang diukur yaitu

- 1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun 2022 dari target sebesar 86 dan realiasi masih dalam proses perhitungan dari Pusat (Badan Pangan Nasional). Capaian Indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan terpenuhinya manfaat bagi masyarakat berupa ketersediaan energy dan protein yang mencukupi (sufficient) bahkan sudah melebihi standar ketersediaan energy 2.000 Kkal/kapita/hari dan protein 63 gr/kapita/hari yang ditetapkan dalam widya karya pangan nasional serta tersedianya cadangan pangan pokok (beras) yang mencukupi bagi masyarakat Maluku.

- 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2022 dari target sebesar 70 dan realisasi 70,7 dengan capaian indikator kinerja 100%. Skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan. Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan : cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).
- 3) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi tahun 2022 ditargetkan 11 ton dengan realiasi 15,654 ton atau persentase capaian 100%. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Indikator pendukung untuk pencapaian sasaran Ketersediaan Cadangan pangan (Beras) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahu 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan serta mengantisipasi dan menangani kejadian kerawanan pangan di Provinsi Maluku maka diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Dan juga Pemerintah daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana social guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
- 4) Informasi Pasokan dan Harga Pangan di Daerah (Stabilitas Harga) tahun 2022 ditargetkan ≤ 3 dengan realiasi 0,21 dengan capaian indikator kinerja 7%. Hal ini disebabkan karena masih cukup tinggi harga pangan, kurangnya ketersediaan pasokan pangan, kurangnya kelancaran distribusi pangan dan kurangnya komunikasi. Untuk memperoleh data dan informasi perkembangan harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data yang diperoleh dari secara periodic atau berkala dari sasaran yang

sama. Metode panel data ini terbukti menggambarkan dinamika perkembangan data dalam kurun waktu relatif panjang. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan dan Stabilitas harga di kota ambon mengalami pengaruh yang baik dimana menghasilkan 11 dokumen pada kab/kota.

5) Inovasi Pengembangan Pangan Lokal

Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat local tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal disamping itu produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan prefensi konsumen lokal pula sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Dalam rencana kerja Dinas Ketahanan pangan Provinsi Maluku tahun 2022 untuk Inovasi pangan lokal ditargetkan 5 kelompok UMKM yang bergerak pada produk lokal berupa Bantuan Mesin Produksi Sagu untuk 1 kelompok UMKM di Kabupaten Aru atau persentase capaian 20%. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan minimnya ketersediaan anggaran.

➤ Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pada Program ini ada 2 (dua) indikator kinerja yang diukur yaitu

1) Berkurangnya daerah rentan rawan pangan

Untuk tahun 2022 penanganan daerah rawan pangan disalurkan bagi masyarakat yang tidak mampu ditargetkan 325 KK, Realisasi yang tertangani sebesar 121 KK. Berdasarkan data yang masuk dari Pemerintah Kabupaten MBD bahwa masyarakat korban banjir tercatat 121 KK dan semua korban banjir tertangani dengan bantuan berupa paket sembako sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100%.

2) Penyediaan peta FSVA.

Tahun 2022 penyediaan Peta FSVA ditargetkan 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan capaian indikator kinerja 100%. FSVA dijadikan sebagai alat yang penting dalam melakukan pentargetan wilayah kabupaten yang paling rawan untuk intervensi ketahanan pangan dan gizi. Penyusunan FSVA tingkat provinsi dimana analisisnya dipertajam sampai pada level kecamatan, wilayah perkotaan tidak diikutsertakan sebab ketahanan pangan perkotaan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kabupaten sehingga perlu dianalisis secara terpisah. Mengingat peranan FSVA yang sangat strategis tersebut, maka updating FSVA pada tahun 2019 menjadi mutlak diperlukan. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret Ketahanan dan Kerentanan Pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat yang mencerminkan kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan dan mengakomodasi pemekaran wilayah. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Mengalokasikan Anggaran untuk dapat menurunkan Desa Rawan pangan minimal 2% yang notebannya berwarna merah yang artinya cukup rawan. Diharapkan untuk tahun berikutnya diupayakan untuk mendapatkan peningkatan anggaran sehingga daerah-daerah yang rentan akan kerawanan pangan di Maluku dapat ditangani dengan baik dan juga pada kegiatan ini perlu terus diupayakan melalui peningkatan aparatur/ Sumber Daya Manusia dalam hal menganalisa data

➤ Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pada Program ini ada 1 (satu) indikator kinerja yang diukur yaitu

1) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan dan Mutu Pangan segar merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, selain itu pangan merupakan komoditi dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

DKP menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan yaitu : 1). Pengawasan Pri Market yakni pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa Sertifikasi dan Registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen; 2). Pengawasan Post Market yakni pengawasan pangan segar diperedaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan post market bersifat reguler yaitu pengawasan secara rutin yang mengikuti jadwal yang telah ditetapkan seperti menjelang Hari Raya Keagamaan maupun Tahun Baru. Sedangkan insidental merupakan pengawasan yang dilaksanakan jika ada kasus atau isu yang mencuat di masyarakat terkait keamanan pangan.

Pada tahun 2022 DKP menargetkan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 65% dan realisasi 70,58% dengan capaian indikator kinerja 100%. Realisasi yang melebihi target tersebut terjadi adanya dukungan pelaku usaha.

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2022, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : kebijakan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Adapun penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
4. Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya.

Selain beberapa unsur dimaksud, penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya tidak dapat dilakukan karena nama Program, Kegiatan, indikator outcome maupun output Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 dan 2020 berbeda/berubah di tahun 2021 maupun Tahun 2023.

Sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen Perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 yaitu Meningkatnya Penanganan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, penanganan distribusi dan cadangan pangan, stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, Penanganan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Penanganan Keamanan Pangan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka pada tahun 2022 telah dilaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.047.977.024 dengan realisasi Rp.16.042.049.003 atau sebesar 94,10% dan capaian fisik kegiatan mencapai 100%. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2021									
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%						
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya forum OPD Ketahanan Pangan dalam rangka penyusunan kegiatan Ketahanan Pangan Provinsi	50 Orang	50 Orang						

2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Pangan di pusat dan kab/kota	12 OP	12 OP						
		Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Tersedianya data statistik ketahanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Data Standar Minimal (SPM) Ketahanan Pangan Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi	30 OP	30 OP						
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN	65 Orang	65 Orang						
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Orang	11 Orang						
2.09.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen						

2.09.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen						
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									
2.09.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Inventarisasi Dan Data Aset Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur	4 Orang	4 Orang						
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	20 Jenis	20 Jenis						
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	30 Jenis	30 Jenis						
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis						
2.09.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	300 Orang	300 Orang						
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi SKPD.	600 Orang	600 Orang						

		Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah	51 OP	70 OP						
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi Dan Data Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	12 Bulan						
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.09.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran	13 Unit	13 Unit						
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Perkantoran	6 Unit	6 Unit						
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Perkantoran	11 Unit	11 Unit						
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan						
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan						
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum, Tenaga Administrasi Dan Teknis Lainnya	22 Orang Teknis	22 Orang Teknis						
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	4 Unit						
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Perkantoran	10 Unit	10 Unit						
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit						
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Unit	12 Unit						
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket						
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya Bantuan Pendukung untuk Pulau Mandiri	10 Unit	9 Unit						
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi									
2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersalurnya Bantuan Pendukung Kemandirian Pangan	10 Unit	9 Unit						

2.09.03	PROGRAM DIVERSIFIKASI KETAHANAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi • Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah • Tersedianya Informasi Pasokan dan Harga Pangan di Daerah • Terdesiminasi paket informasi pangan lokal 	85	85						
				87	70,1						
				11 Ton	-						
				11 Dokumen	11 Dokumen						
				50 Jenis	54 Jenis						
2.09.03.1.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan										
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Neraca Bahan Makanan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perhitungan Neraca Bahan Makanan	30 Orang	30 Orang							
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Terlaksananya Gelar Pangan Lokal Di 7 Lokasi Stunting	7 Lokasi	7 Lokasi							
		Tersedianya Olahan Pangan Lokal Berbasis Sagu Menuju Rekor Muri	500 Resep	500 Resep							
2.09.03.1.01.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Tersedianya Data Panel Harga Dan Pasokan Pangan Di 5 Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen							

		Secara Teratur Dan Berkelanjutan								
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Teralokasinya Toko Tani Maluku Untuk Menjaga Stabilitas Harga Pangan	1 Unit	1 Unit						
2.09.03.1.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi									
2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Pangan Lokal Di Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pemantauan Dan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Di 4 Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi									
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pangan Yang Aman Untuk Dikonsumsi Dan Tersedianya Bahan Promosi	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Terselenggaranya Promosi Hasil Produksi Pangan Lokal Di Tingkat Nasional	50 Produk	50 Produk						
2.09.03.1.04.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi Dan Sosialisasi Konsumsi	Mendorong Penerapan Konsumsi B2SA dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

	Paangan Beragam, Bergisi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	Mendorong Kretifitas Dan Inovasi Dalam Pengembangan Pangan Lokal Yang Bernilai Komersial								
		Tercapainya Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Konsumsi Dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	30 Kelompok	30 Kelompok						
		Terjalannya Kerjasama Penanganan Keamanan Pangan Daerah Dengan Instansi Terkait Di Tingkat Provinsi	5 Instansi	5 Instansi						
		Terlaksananya Koordinasi dan Sosialiasi Dalam Rangka Peningkatan usaha Produk Industri Pangan Lokal di Kab. Maluku Tengah	8 OP	8 OP						
		Tersedianya Bantuan Bibit/Anakan Untuk Meningkatkan Konsumsi Pangan B2SA di 7 Lokasi Stunting	7 Lokasi	7 Lokasi						
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> Tertanganinya daerah rentan rawan pangan Tersedianya peta FSVA 	300 KK	250 KK						
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi									
			1 Dokumen	1 Dokumen						

2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota	Tersedianya Data Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tingkat Kecamatan Dan Desa	1 Buku	1 Buku						
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi									
2.09.04.1.02.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Koorporasi Usaha Tani Di Kabupaten MBD	30 Orang	30 Orang						
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Akses Ketersediaan Pangan di Kab. Buru dan Malteng	25 Orang	25 Orang						
		Tersedianya Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan Akibat Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pengawasan Pangan Segar yang Aman dan Bermutu Persentase OKKPD 	65%	68%							
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Terlaksananya Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Dokumen	20 Dokumen							
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Dengan Metode Uji Cepat Rapid Tes Kit	1 Kegiatan	1 Kegiatan							
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022										
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%	

2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	80%
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	80%
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	355 Orang	134 Orang	67 Orang	58 Orang	86,57%	67 Orang	194 Orang	80%
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
2.09.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2.09.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	25 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	20 Laporan	80%

		Kuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD								
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									
2.09.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	16 Orang	8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	32 Orang	80%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	80%
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	80%

2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	80%
2.09.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	255 Laporan	102 Laporan	51 Laporan	51 Laporan	100%	51 Laporan	204 Laporan	80%
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	60 Unit	1 Unit	12 Unit	1 Unit	8,33%	12 Unit	1 Unit	1,6%
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 Unit	22 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	44 Unit	80%
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 Unit	16 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	32 Unit	80%
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	80%
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	80%
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	110 Laporan	44 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	88 Laporan	80%
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 Unit	14 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	28 Unit	80%
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 Unit	40 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	80 Unit	80%
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	8 Unit	80%
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	60 Unit	24 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	48 Unit	80%

2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	55 Ton	107,964 Ton	11 Ton	15,654 Ton	100%	11 Ton	123,618 Ton	100%
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi									
2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian	60 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	11 Unit	18,33%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 			87	70,1	81,26%	87	70,1	
2.09.03.1.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan									
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2.09.03.1.01.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	0 Unit	0%

2.09.03.1.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Pangan Provinsi Dan Cadangan									
2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi									
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	80%
2.09.03.1.04.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi Dan Sosialisasi Konsumsi Paangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	25 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	20 Laporan	80%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	• Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan								
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi									

2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi									
2.09.04.1.02.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan pangan segar yang aman dan bermutu								
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	100 Dokumen	40 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	80 Dokumen	80%
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	60 Sertifikat	-	-	-	-	-	30 Sertifikat	50%

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Tujuan yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka mengatasi target kinerja yang tidak tercapai yaitu :

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi tentang keamanan pangan segar dan olahan non industri kepada produsen, pedagang, anak sekolah dan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan pangan yang aman dapat meningkat.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait keamanan pangan yang masuk dan keluar wilayah Provinsi Maluku.
3. Melakukan penyebaran informasi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, bimtek dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman serta keamanan pangan dan .
4. Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.
5. Mengoptimalkan kerjasama antar Perangkat Daerah dan juga unsur masyarakat untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/Standar Nasional untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU)/Muatan Lokal, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan bidang urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini.

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	15		16
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	-	15	11	11	-	15,65	-	-	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	-	-	25,4	23,7	-	48,30	-	-	
3	Skor PPH Konsumsi (Angka)		Skor PPH Konsumsi (Angka)	87	70	75	75	70,1	70,7	-	-	
4	Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu (%)		Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu (%)	65	70	75	80	60	70,58	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Proses dalam mengikhtiarkan ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada prioritas dan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya.

Permasalahan pokok ketahanan pangan di Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi antara lain :

1. Masih rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dimana pada tahun 2022 baru mencapai 70,7%.
2. Stabilitas harga pangan pada tahun 2022 hanya mencapai 0,21 dari target ≤ 3
3. Inovasi pangan lokal pada tahun 2022 baru mencapai 1 kelompok UMKM dari target 5 Kelompok UMKM.

Dalam menjalankan Tupoksi nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul, yaitu :

1. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras yang cukup tinggi dan kurangnya konsumsi sayur dan buah;
2. Belum optimalnya mekanisme distribusi pangan;
3. Belum optimalnya penanganan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
4. Belum optimalnya pengelolaan pangan berbasis sumberdaya lokal;
5. Belum stabilnya pasokan pangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
7. Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah **“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”**.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pemerintah Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau;
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata; dan
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku dimaksud, DKP sesuai Tupoksi nya yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan;
4. Pembinaan teknis dibidang pangan;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Gubernur untuk:

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku; dan

2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Tugas Dewan meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas DKP terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke – 3 yaitu “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dalam menjalankan Tupoksinya pada bidang urusan Pangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi terkait dengan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan pangan nasional yang lebih terfokus pada beras;
2. Upaya penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber pangan karbohidrat lokal belum optimal;
3. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam :
 - Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras,
 - Masih rendahnya konsumsi pangan hewani (daging), kacang-kacangan serta sayur dan buah.
4. Kemampuan memproduksi pangan lokal masih rendah, terutama pada musim paceklik;

5. Penerapan teknologi produksi dan teknologi pengolahan pangan lokal di masyarakat belum mampu mengimbangi pangan olahan asal impor yang membanjiri pasar;
6. Kurangnya pelatihan bagi penyuluh/pendamping dalam menjalankan program pembinaan masyarakat tentang pangan;
7. Belum terlaksananya diversifikasi, produksi, dan konsumsi pangan dengan baik;
8. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya;
9. Terbatasnya tenaga/sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas;
10. Adanya kecenderungan masyarakat terhadap makanan cepat saji dari bahan impor;
11. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit mengubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil;
12. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Afinitas dalam pengembalian dana Bansos guna meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD);
13. Belum tersedianya data potensi daerah yang terintegrasi;
14. Sektor pertanian bukan merupakan program unggulan; dan
15. Biaya transportasi daerah kepulauan tergolong masih sangat tinggi.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Maluku adalah :

1. Tersedianya anggaran APBD maupun APBN yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan ketahanan pangan;
2. Adanya koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan MUI dalam melakukan berbagai upaya untuk standarisasi pangan yang sehat dan halal;

3. Tersedia pekarangan masyarakat yang cukup luas untuk produksi pangan lokal yang berkualitas yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Adanya harga pembelian pemerintah beras oleh Bulog, LDPM, dan Kelompok Lumbung Masyarakat;
5. Terbentuknya Kelompok Afinitas pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
6. Adanya kebijakan nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); dan
7. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan ketahanan

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Isu – isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras yang masih tinggi;
2. Menstabilisasikan harga bahan pangan di tingkat petani;
3. Mengoptimalkan pengembangan Diversifikasi Pangan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
5. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat tentang ketahanan pangan berbasis agribisnis;
6. Mengoptimalkan mekanisme distribusi pangan;
7. Meningkatkan keamanan pangan.

2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Sejak awal ditetapkannya Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan dibandingkan Analisis Kebutuhan yang memperhatikan fokus kegiatan sebagai upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Sasarannya adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 membutuhkan penyesuaian target dan anggaran pada beberapa kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2024
PROVINSI MALUKU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS					Catatan Penting
	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Ambon	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13.694.476.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Ambon	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13.694.476.000	

	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon			1.794.450.000	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon			1.794.450.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	882.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	882.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	639.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	639.450.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	273.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	273.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Ambon			7.159.164.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Ambon			7.159.164.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	68 Orang	6.874.614.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	68 Orang	6.874.614.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Ambon	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 Dokumen	110.250.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Ambon	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 Dokumen	110.250.000	

Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	11.550.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	11.550.000	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	162.750.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	162.750.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Ambon			115.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Ambon			115.500.000	
Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	115.500.000	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	115.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Ambon			288.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Ambon			288.750.000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	115.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	115.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Ambon	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	173.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Ambon	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	173.250.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Ambon			949.970.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Ambon			949.970.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	47.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	47.250.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	55.370.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	55.370.000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	76.650.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	76.650.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Ambon	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Paket	12.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Ambon	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Paket	12.600.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	111 Laporan	600.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	111 Laporan	600.600.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	157.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	157.500.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon			1.102.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon			1.102.500.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	12 Unit	336.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	12 Unit	336.000.000	
Pengadaan Mebel	Kota Ambon	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	15 Paket	472.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Ambon	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	15 Paket	472.500.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	136.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	136.500.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	73.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	73.500.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	9 Unit	84.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	9 Unit	84.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon			1.032.327.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon			1.032.327.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	3.327.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	3.327.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	105.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 Laporan	924.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 Laporan	924.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon			1.251.815.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon			1.251.815.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	94.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	94.500.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Kota Ambon	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	131.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Kota Ambon	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	131.250.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 Unit	26.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 Unit	26.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	593.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	593.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	195.565.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	195.565.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Paket	210.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Paket	210.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Ambon	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	11 Ton	126.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Ambon	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	11 Ton	126.000.000	
	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Malra dan Kota Tual		16 Unit	126.000.000	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Malra dan Kota Tual		16 Unit	126.000.000	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Malra dan Kota Tual	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	16 Unit	126.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Malra dan Kota Tual	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	16 Unit	126.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	11 Kab/ Kota	• Skor Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	75	4.176.325.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	11 Kab/ Kota	• Skor Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	75	4.176.325.000	
	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka	11 Kab/ Kota			1.204.825.000	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka	11 Kab/ Kota			1.204.825.000	

	Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan					Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan					
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Neraca Bahan Makanan	Kota Tual	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	88.200.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Neraca Bahan Makanan	Kota Tual	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	88.200.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Ambon dan Tual	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Ambon dan Tual	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	400.000.000	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	11 Kab/ Kota	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	165.375.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	11 Kab/ Kota	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	165.375.000	
	Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Ambon	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	551.250.000	Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Ambon	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	551.250.000	
	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Kota Ambon dan Tual			308.700.000	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Kota Ambon dan Tual			308.700.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kota Tual	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 Dokumen	88.200.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kota Tual	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 Dokumen	88.200.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kota Ambon	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	1 Laporan	220.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kota Ambon	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	1 Laporan	220.500.000	

	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	11 Kab/ Kota			2.662.800.000	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	11 Kab/ Kota			2.662.800.000	
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	11 Kab/ Kota	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	1.124.550.000	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	11 Kab/ Kota	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	1.124.550.000	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi Dan Sosialisasi Konsumsi Paangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	11 Kab/ Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	5 Laporan	1.433.250.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi Dan Sosialisasi Konsumsi Paangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	11 Kab/ Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	5 Laporan	1.433.250.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Ambon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	105.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Ambon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	105.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	11 Kab/ Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan	23,7%	463.050.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	11 Kab/ Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan	23,7%	463.050.000	
	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	11 Kab/ Kota			165.375.000	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	11 Kab/ Kota			165.375.000	

	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota	Kota Tual	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan provinsi yang dimutakhirkan	1 Dokumen	165.375.000	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota	Kota Tual	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan provinsi yang dimutakhirkan	1 Dokumen	165.375.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				297.675.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				297.675.000	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kota Ambon, Tual, Kab. Buru, Bursel dan Malteng	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	1 Dokumen	187.425.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kota Ambon, Tual, Kab. Buru, Bursel dan Malteng	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	1 Dokumen	187.425.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Kab/ Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	1 Dokumen	110.250.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Kab/ Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	1 Dokumen	110.250.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	11 Kab/ Kota	Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu	80%	407.400.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	11 Kab/ Kota	Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu	80%	407.400.000	

	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Kab/ Kota			407.400.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Kab/ Kota			407.400.000	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	11 Kab/ Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina	3 Dokumen	220.500.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	11 Kab/ Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina	3 Dokumen	220.500.000	
	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN)	Kota Ambon, Kab. SBB, SBT, Buru dan Malteng	Jumlah Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (Sertifikat)	30 Sertifikat	186.900.000	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN)	Kota Ambon, Kab. SBB, SBT, Buru dan Malteng	Jumlah Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (Sertifikat)	30 Sertifikat	186.900.000	
TOTAL PAGU INDIKATIF					18.867.251.000	TOTAL PAGU INDIKATIF					18.867.251.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu dasar penetapan alokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024, adalah usulan sektoral pangan dari kabupaten/kota melalui Forum OPD.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan/ Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2 Kabupaten /Kota (Kab. Maluku Tenggara dan Kota Tual)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Alat Mesin)	16 kelompok	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam,	11 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi,	11 Kelompok	

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		seimbang dan aman (B2SA) (Alat Me sin)		
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan /Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi (Paket Bantuan Sembako)	500 KK	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” untuk menuju Visi “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pembangunan Nasional diarahkan pada: 1) Pembangunan Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Kewilayahan; 4) Pembangunan Infrastruktur; dan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Penyusunan program dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follow program*.

Penelaahan terhadap keselarasan kebijakan nasional berkenaan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dimana prioritas pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas ; dan
2. Memperkuat Stabilitas Politik, hukum, keamanan, HAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Sejalan dengan arah pembangunan lembaga pusat dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku turut berperan terhadap proses pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku yaitu yaitu **Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan** yang mengarah pada fokus pembangunan daerah yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat** dengan indikator **Percepatan Pengentasan Kemiskinan** dan Sasarannya adalah **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** dengan tujuan indikator OPD **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku merupakan lembaga teknis daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Demi keselarasan arah pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi Maluku yang dipandu oleh RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019-2024, dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang akan di capai sampai tahun 2024. Tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat** dengan indikator **Percepatan Pengentasan Kemiskinan** dan Sasarannya adalah **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** dengan tujuan indikator OPD **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan Sasaran Tujuan Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu

skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Cadangan pangan pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN URUSAN PANGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target 2024
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indikator Tujuan: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87%
			Indikator Sasaran: Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	11 Ton

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tahun 2024 adalah:

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi Gubernur Maluku Periode 2019-2024 “yaitu Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugus Kepulauan” dengan Misi ke-3 yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Untuk IKU Daerah urusan pangan yaitu Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan target tahun 2024 sebesar 76,95% untuk mencapai IKP tersebut tentunya tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan

b) Pencapaian SDGs;

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *NO ONE LEFT BEHIND*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk itu, sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Maluku Periode 2019-2024, Perubahan RPJMD, dan Perubahan Renstra, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berupaya dan berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan yang merupakan 2 dari 17 SDGs Nasional dengan cara meningkatkan cadangan daerah provinsi, meningkatkan pola pangan harapan konsumsi, menangani daerah rentan rawan pangan dan meningkatkan pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu yang tertuang dalam 4 program urusan pangan dan 1 program penunjang.

c) Pengentasan Kemiskinan;

Pengentasan Kemiskinan merupakan tantangan yang sangat cukup berat saat ini, namun begitu tidak boleh menyerah harus tetap semangat dalam menatap kedepan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan.

Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berupaya dan berkomitmen pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan alat mesin kepada masyarakat miskin agar mereka mampu menghasilkan produk pangan secara mandiri dan bisa dijadikan layanan usaha untuk meningkatkan pendapatan atau ekonomi kaum miskin. Bantuan tersebut tertuang pada program dinas ketahanan pangan yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

d) Pencapaian IKU Perangkat Daerah;

TABEL 3.2
CAPAIAN IKU DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU

NO	INDIKATOR	TARGET IKU					PENCAPAIAN IKU				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	15	11	11	11	11	99,95	-	15	-	-
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	-	-	-	25,4	23,7	-	-	48,30	-	-
3	Skor PPH Konsumsi (Angka)	86,5	87	70	75	75	67,3	70,1	70,7	-	-
4	Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu (%)	55	65	70	75	780	55	60	70,58	-	-

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;

Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Meningkatnya permintaan domestik seiring upaya percepatan vaksinasi dan penanganan pandemi secara umum diperkirakan menjadi pendorong utama bagi peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Maluku secara keseluruhan di tahun 2022. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta aktivitas investasi. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor luar negeri Provinsi Maluku yang bersumber dari ekspor migas diperkirakan meningkat, didukung juga dengan prospek meningkatnya permintaan terhadap komoditas ekspor non migas dari Provinsi Maluku. Peningkatan juga diperkirakan terjadi pada impor luar negeri, terutama untuk impor bahan bakar minyak seiring dengan meningkatnya permintaan domestik.

Tingkat inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2022 diperkirakan berada di dalam rentang sasaran inflasi Maluku sebesar $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan tahun 2022 diperkirakan akan didominasi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi. Perbaikan daya beli masyarakat dibandingkan tahun 2021 akan mendorong konsumsi terhadap makanan dan minuman. Selain itu, penerapan new normal dan pelonggaran pembatasan sosial di Provinsi Maluku diperkirakan akan membuka ruang bagi pelaksanaan beberapa kegiatan sosial yang rutin dilakukan sebelum pandemi. Selanjutnya, pada kelompok transportasi, tekanan inflasi masih akan didominasi oleh angkutan udara sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial. Tekanan inflasi pada angkutan udara diperkirakan berada pada tren meningkat sepanjang tahun 2022, terutama saat perayaan HBKN.

Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berupaya dan berkomitmen menurunkan tingkat inflasi di Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan cara melakukan Gelar Pangan Murah Menjelang Lebaran dan Nataru diharapkan melalui kegiatan ini mampu menjaga stabilitas harga pangan dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa adanya disparitas harga pangan. Kegiatan tersebut tertuang pada program dinas ketahanan pangan yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

f) Pengembangan Kewilayahan.

Dengan kondisi Wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan diperlukan strategi yang spesifik agar pengembangan potensi pangan dapat optimal. Kondisi Maluku yang didominasi lautan dan keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi menjadi kendala dalam mengembangkan usaha pangan.

Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Maluku juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha pangan. Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat sementara peningkatan produksi pangan dan produktivitas hasil pertanian juga terus diupayakan.

Pendekatan ketahanan pangan berbasis gugus pulau merupakan satu satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan pangan lokal. Dikarenakan pangan local tiap daerah tersedia dalam jumlah yang cukup untuk tiap gugus pulau dan lebih mudah dikembangkan sesuai kondisi iklim setempat.

Ketahanan pangan di wilayah kepulauan seperti wilayah pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku adalah berbeda dengan pulau-pulau besar. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh produksi pangan bersumber dari lahan terbatas di pulau kecil dan distribusinya yang dibatasi oleh sarana dan prasarana serta komunikasi yang sulit.

Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian dan pangan yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

3.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada Permendagri 90 tahun 2019 kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku memiliki berbagai penyesuaian. Terdapat perubahan pada program dan kegiatan sehingga menyebabkan penyesuaian pada indikator program dan kegiatan mulai tahun anggaran 2021. Penyesuaian yang dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan yang telah disusun dan disesuaikan dengan arah kebijakan nasional.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dokumen RKPDP Tahun 2024 yang telah disusun untuk dioperasionalkan pada tahun 2024 terdistribusi ke dalam 5 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan	1	2	3
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	3	4	6
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1	2	3
Bidang Keamanan Pangan /UPTD BPMKP	2	2	8
Sekretariat	1	8	30

Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang operasional, perumusan program dan kegiatan menjadi bagian yang penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah merupakan jabaran lebih konkrit dan rinci dari program yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Program dan kegiatan pembangunan tahunan tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta perkiraan kebutuhan dana. Penjabaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tergambar sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Ambon	100%	13.694.476.000		100%	14.378.149.800
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Ambon		1.794.450.000			1.884.172.500
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	3 Dokumen	882.000.000		3 Dokumen	926.100.000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon	2 Laporan	639.450.000		2 Laporan	671.442.500
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Ambon	2 Laporan	273.000.000		2 Laporan	286.650.000

2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Ambon		7.159.164.000			7.517.122.200
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Ambon	68 Orang	6.874.614.000		68 Orang	7.218.344.700
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Ambon	3 Dokumen	110.250.000		3 Dokumen	115.762.500
2.09.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	11.550.000		1 Dokumen	12.127.500
2.09.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	6 Dokumen	162.750.000		6 Dokumen	170.887.500
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Kota Ambon		115.500.000			121.275.000
2.09.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	115.500.000		1 Laporan	121.275.000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Ambon		288.750.000			303.187.500
2.09.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon	1 Dokumen	115.500.000		1 Dokumen	121.275.000

2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Ambon	9 Orang	173.250.000		9 Orang	181.912.500
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Ambon		949.970.000			997.468.500
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Ambon	12 Paket	47.250.000		12 Paket	49.612.500
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Ambon	12 Paket	55.370.000		12 Paket	58.138.500
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Ambon	12 Paket	76.650.000		12 Paket	80.482.500
2.09.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kota Ambon	12 Paket	12.600.000		12 Paket	13.230.000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Ambon	111 Laporan	600.600.000		111 Laporan	630.630.000
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	157.500.000		1 Dokumen	165.375.000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon		1.102.500.000			1.157.625.000
2.09.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Ambon	12 Unit	336.000.000		12 Unit	352.800.000

2.09.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Kota Ambon	15 Paket	472.500.000		15 Paket	496.125.000
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Ambon	7 Unit	136.500.000		7 Unit	143.325.000
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Ambon	1 Unit	73.500.000		1 Unit	77.175.000
2.09.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Kota Ambon	9 Unit	84.000.000		9 Unit	88.200.000
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon		1.032.327.000			1.083.943.350
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Ambon	4 Laporan	3.327.000		4 Laporan	3.493.350
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Ambon	4 Laporan	105.000.000		4 Laporan	110.250.000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Ambon	26 Laporan	924.000.000		26 Laporan	970.200.000
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon		1.251.815.000			1.313.355.750
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Ambon	8 Unit	94.500.000		8 Unit	99.225.000

2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Ambon	8 Unit	131.250.000		8 Unit	137.812.500
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Ambon	11 Unit	26.250.000		11 Unit	27.562.500
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Ambon	3 Unit	593.250.000		3 Unit	622.912.500
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Ambon	13 Unit	195.565.000		13 Unit	205.343.250
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kota Ambon	2 Paket	210.000.000		2 Paket	220.500.000
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kota Ambon	11 Ton	126.000.000		11 Ton	132.300.000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Kab. Malra dan Kota Tual	16 Unit	126.000.000		16 Unit	132.300.000
2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Kab. Malra dan Kota Tual	16 Unit	126.000.000		16 Unit	132.300.000

2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	11 Kab/ Kota	75	4.176.325.000		75	4.385.141.250
2.09.03.1.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan		11 Kab/ Kota		1.204.825.000			1.265.066.250
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Tual	1 Laporan	88.200.000		1 Laporan	92.610.000
2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Ambon dan Tual	2 Laporan	400.000.000		2 Laporan	420.000.000
2.09.03.1.01.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	11 Kab/ Kota	1 Dokumen	165.375.000		1 Dokumen	173.643.750
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kota Ambon	1 Unit	551.250.000		1 Unit	578.812.500
2.09.03.1.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Kota Ambon dan Tual		308.700.000			324.135.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	Kota Tual	1 Dokumen	88.200.000		1 Dokumen	92.610.000
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Kota Ambon	1 Laporan	220.500.000		1 Laporan	231.525.000

2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		11 Kab/ Kota		2.662.800.000			2.795.940.000
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	11 Kab/ Kota	1 Dokumen	1.124.550.000		1 Dokumen	1.180.777.500
2.09.03.1.04.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi Dan Sosialisasi Konsumsi Paangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	11 Kab/ Kota	5 Laporan	1.433.250.000		5 Laporan	1.504.912.500
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Ambon	1 Laporan	105.000.000		1 Laporan	110.250.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	11 Kab/ Kota	23,7%	463.050.000		23,7%	486.202.500
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		11 Kab/ Kota		165.375.000			173.643.750
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan provinsi yang dimutakhirkan	Kota Tual	1 Dokumen	165.375.000		1 Dokumen	173.643.750
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				297.675.000			312.558.750

2.09.04.1.02.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Kota Ambon, Tual, Kab. Buru, Bursel dan Malteng	1 Dokumen	187.425.000		1 Dokumen	196.796.250
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	umlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	11 Kab/ Kota	1 Dokumen	110.250.000		1 Dokumen	115.762.500
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang Aman dan Bermutu	11 Kab/ Kota	80%	407.400.000		80%	427.770.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		11 Kab/ Kota		407.400.000			427.770.000
2.09.05.1.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina	11 Kab/ Kota	3 Dokumen	220.500.000		3 Dokumen	231.525.000
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN)	Jumlah Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (Sertifikat)	Kota Ambon, Kab. SBB, SBT, Buru dan Malteng	30 Sertifikat	186.900.000		30 Sertifikat	196.245.000
TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2024					18.867.251.000		TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2025	19.809.563.550

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024 yang telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 4 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terbagi menjadi 15 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.562.251.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 bidang teknis serta 1 UPTD BPMKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan rincian tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

KODE	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Ambon	100%	13.694.476.000
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Ambon		1.794.450.000
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	3 Dokumen	882.000.000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon	2 Laporan	639.450.000
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Ambon	2 Laporan	273.000.000
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Ambon		7.159.164.000
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Ambon	68 Orang	6.874.614.000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Ambon	3 Dokumen	110.250.000
2.09.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	11.550.000
2.09.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	6 Dokumen	162.750.000

2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Kota Ambon		115.500.000
2.09.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	115.500.000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Ambon		288.750.000
2.09.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon	1 Dokumen	115.500.000
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Ambon	9 Orang	173.250.000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Ambon		949.970.000
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Ambon	12 Paket	47.250.000
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Ambon	12 Paket	55.370.000
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Ambon	12 Paket	76.650.000
2.09.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kota Ambon	12 Paket	12.600.000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Ambon	111 Laporan	600.600.000
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	157.500.000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon		1.102.500.000
2.09.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Ambon	12 Unit	336.000.000
2.09.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Kota Ambon	15 Paket	472.500.000
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Ambon	7 Unit	136.500.000

2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Ambon	1 Unit	73.500.000
2.09.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Kota Ambon	9 Unit	84.000.000
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon		1.032.327.000
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Ambon	4 Laporan	3.327.000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Ambon	4 Laporan	105.000.000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Ambon	26 Laporan	924.000.000
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon		1.251.815.000
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Ambon	8 Unit	94.500.000
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Ambon	8 Unit	131.250.000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Ambon	11 Unit	26.250.000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Ambon	3 Unit	593.250.000
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Ambon	13 Unit	195.565.000
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kota Ambon	2 Paket	210.000.000

2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kota Ambon	11 Ton	126.000.000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Kab. Malra dan Kota Tual	16 Unit	126.000.000
2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Kab. Malra dan Kota Tual	16 Unit	126.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	11 Kab/ Kota	75	4.176.325.000
2.09.03.1.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan		11 Kab/ Kota		1.204.825.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Tual	1 Laporan	88.200.000
2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Ambon dan Tual	2 Laporan	400.000.000
2.09.03.1.01.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	11 Kab/ Kota	1 Dokumen	165.375.000
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kota Ambon	1 Unit	551.250.000
2.09.03.1.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Kota Ambon dan Tual		308.700.000
2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	Kota Tual	1 Dokumen	88.200.000
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Kota Ambon	1 Laporan	220.500.000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		11 Kab/ Kota		2.5662.800.000

2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	11 Kab/ Kota	1 Dokumen	1.124.550.000
2.09.03.1.04.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi Dan Sosialisasi Konsumsi Paangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	11 Kab/ Kota	5 Laporan	1.433.250.000
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Ambon	1 Laporan	105.000.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	11 Kab/ Kota	23,7%	463.050.000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		11 Kab/ Kota		165.375.000
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kab/Kota	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan provinsi yang dimutakhirkan	Kota Tual	1 Dokumen	165.375.000
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				297.675.000
2.09.04.1.02.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Kota Ambon, Tual, Kab. Buru, Bursel dan Malteng	1 Dokumen	187.425.000
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	11 Kab/ Kota	1 Dokumen	110.250.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang Aman dan Bermutu	11 Kab/ Kota	80%	407.400.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		11 Kab/ Kota		407.400.000
2.09.05.1.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina	11 Kab/ Kota	3 Dokumen	220.500.000
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN)	Jumlah Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota (Sertifikat)	Kota Ambon, Kab. SBB, SBT, Buru dan Malteng	30 Sertifikat	186.900.000
TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2024					18.867.251.000

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang akan tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024, setiap unit terkait (Sekretariat dan Bidang serta UPTD) wajib menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi maupun pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik antar program, antara kegiatan dalam satu program, maupun kegiatan antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing unit kerja. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Provinsi.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja dalam lingkup Dinas, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program - program yang tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas untuk menyusun kebijakan publik, baik yang berupa regulasi maupun pelayanan publik, dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun 2024, dengan ketentuan :
 - a. Uraian penggunaan pagu indikatif Tahun 2024 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas agenda kerja pembangunan daerah.
 - b. Uraian rencana penggunaan pagu indikatif Tahun 2024 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas SKPD sesuai tupoksinya.

3. Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 ini wajib mengikuti prinsip - prinsip pengarusutamaan yaitu : pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat luas dan stakeholder lainnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan program - program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang=undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program - program pembangunan.

5.2. Rencana Tindaklanjut

Pada akhir tahun 2024, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam nota kesepakatan KUA dan PPA, RKA SKPD. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD di Provinsi dan peraturan- peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku wajib melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil monitoring/pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, Maret 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI MALUKU,



Ir. LUTHFI RUMBIA, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630310 198908 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Pengeringan Pantai Waihaong No. 1 Telepon 0911-312434 Fax 0911-312474
E-mail : dkp@malukuprov.go.id
A M B O N 97112

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 000.7.2.6/21.2 /SK-DKP/ III /2023

Tentang

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab

- a) Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024;
- b) Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024
- c) Melakukan pengawasan langsung secara internal terhadap jalannya kegiatan.

2. Ketua

- a) mengkoordinir seluruh tahapan proses kegiatan untuk menjamin kelangsungan kegiatan dan melakukan pengawasan langsung secara internal terhadap jalannya kegiatan;
- b) Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024
- c) Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024
- d) Bertanggungjawab penuh terhadap semua tahapan kegiatan secara administratif

3. Anggota

- a) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
- b) Melakukan Analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024
- c) Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
- d) Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024
- e) Merumuskan tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024
- f) Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024
- g) Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja Bidang masing-masing
- h) Melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidang masing-masing
- i) Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua pada Keputusan Kepala Dinas ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 2 Maret 2023



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI MALUKU,

Ir. LUTHFI RUMBIA, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630310 198908 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Provinsi Maluku di Ambon ;
3. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon ;
4. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
5. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
Tanggal : 2 Maret 2023
Nomor : 000.7.2.6/21.2/SK-DKP/III/2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Maluku Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Luthfi Rumbia, MT/ Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Penanggungjawab
2.	Ir. Nurhajati Padang, M.Si/ Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Ketua
3.	Abdul Madjid Makassar, S.Pi/ Kepala Bidang Konsumsi dan Pengakaragaman Pangan	Anggota
4.	Chairul Achmad Hurasan, S.Hut/ Kepala Bidang Keamanan Pangan	Anggota
5.	Yanti Likur, S.STP, M.Si/ Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
6.	Nuzla Diponegoro, S.P/ Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
7.	Ir. Sandra Diana Pattinaja, M.Si/ Kepala UPTD BPMKP Provinsi Maluku	Anggota
8.	Asri Rahim, S.E, M.Ec, Dev/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Anggota
9.	Fintje Huwae, SP/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Anggota
10.	Defina Fadhilah Thalib, S.Kom/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Anggota
11.	Arfan Anamu, S.IP/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Anggota
12.	Dita Anggraeny Nakul, S.E/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Anggota
13.	Hendra Ramli, S.H/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Anggota



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI MALUKU,

Ir. LUTHFI RUMBIA, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630310 198908 1 001